

The Role Of Economic Growth : The Effect Of Regional General Income And Balancing Fund On Capital Expenditure

Laurentia Carissa Endarto¹, Diah Ekaningtias²

^{1,2,3,4} Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 5/2/2024

Revised 4/3/2024

Accepted 1/6/2024

JEL Classification: -

Key words:

Balancing Fund; Capital Expenditure
Economic Growth; Regional General
Income

ABSTRACT

This study uses the dependent variable, namely capital expenditure calculated by expenditure on land, equipment and machinery, buildings and buildings, roads, irrigation, networks, and other fixed assets and the independent variable is the original opinion of the region and the balancing fund measured using the amount of each district government in East Java Province. With the population of all districts registered with the Central Statistics Agency (BPS) with a sample of 29 districts for the 2019-2022 period. Sampling is carried out by purposive sampling method, where samples are selected based on criteria made by researchers. Data were analyzed by descriptive analysis techniques, classical assumption tests and Moderated Regression Analysis (MRA) using SPSS 26. The results of this study show that regional general income affects capital expenditure, balancing funds affect capital expenditure, while with economic growth, regional original income has no effect and balancing funds affect capital expenditure.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan mempengaruhi belanja modal dengan adanya pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Kabupaten Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu belanja modal yang dihitung dengan belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan asset tetap lainnya dan variabel independen adalah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang diukur menggunakan jumlah dari masing-masing pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria yang dibuat oleh peneliti. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan Moderated Regression Analysis (MRA) menggunakan SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal, dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal,

1. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang diatur dan ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan

pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi kebawah dan melibatkan masyarakat secara luas. Artinya bahwa pembangunan pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah.

Pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan aspirasi masyarakat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur ini memerlukan pembangunan aset tetap. Pembangunan aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur. Pembangunan sarana prasarana tujuannya untuk menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Pembangunan aset tetap didanai melalui pengalokasian anggaran belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010).

Permasalahan belanja modal sampai saat ini belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah, sehingga ke depan hendaknya lebih intensif diperhatikan dan diprioritaskan, karena pada kenyataannya selama ini anggaran pemerintah dalam alokasi APBD lebih besar porsi untuk belanja pegawai daripada belanja modal. Hal ini mengakibatkan pembangunan di daerah belum terlihat berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan masih minimnya kualitas pelayanan publik (Waskito, 2019).

Peningkatan alokasi anggaran belanja modal membuat daerah dapat menyediakan infrastruktur layanan publik berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun fasilitas publik lainnya kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut (Nashshar, 2022). Berikut data laporan realisasi belanja modal Provinsi Jawa 2019-2022 yang disajikan dalam Gambar berikut ini :

Gambar 1. Grafik Realisasi Belanja Modal



Sumber : Badan Pusat Statistik

Data dari badan pusat statistik berdasarkan seperti tabel 1.1 provinsi Jawa Timur memiliki rata-rata belanja modal tertinggi yaitu sebesar Rp 2.238.545.865.442.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi	Tahun				Rata-rata
	2019	2020	2021	2022	
Jawa Timur	5,53	-2,33	3,56	5,34	3,02
Jawa Tengah	5,36	-2,65	3,33	5,31	2,83
Jawa Barat	5,02	-2,52	3,74	5,45	2,92
Banten	5,26	-3,39	4,49	5,03	2,85

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 1 menginterpretasi bahwa Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi mengalami rata-rata peningkatan sebesar 3,02 persen dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa. Di periode tahun yang sama, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah 2,83, Jawa Barat 2,92, Banten 2,85 persen. Adanya pembangunan ekonomi di suatu daerah oleh karena itu pemerintah selalu mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi selalu meningkat dari tahun ke tahun yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Vivi Oktavia, 2023).

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat meningkatkan PAD dan dana perimbangan terhadap alokasi belanja

modal pemerintah daerah. Meningkatnya alokasi belanja modal dapat membangun daerah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Kristianti, 2019). Disinilah peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan mengefektifkan belanja modal pemerintah daerah dalam menunjang aktivitas perekonomian masyarakat.

2. LANDASAN TEORI

Teori Stewardship (Steward Theory)

Teori *Stewardship* pertama kali dicetuskan oleh Steward pada tahun 1972. Teori *stewardship* mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana penerima amanah (*steward*) termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan pihak pemberi amanah (*principal*) (Steward, 1972 : 886-903).

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah. Eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang menambah aset atau inventaris yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 periode (12 bulan) berdasarkan periode akuntansi (Khusaini, 2018:163). Aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya.

Peran belanja modal sangat penting di daerah, dengan adanya pembangunan mampu membuat daerah menjadi berkembang sehingga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan

investasi di daerah. Belanja modal digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah seperti belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jembatan, dan jaringan dan aset tetap lainnya. Dalam hal ini pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab atas pengadaan saran dan prasarana yang dibutuhkan oleh publik demi kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah ataupun untuk fasilitas publik.

Belanja Modal = Jumlah Belanja Modal dari masing-masing pemerintah

Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD menjadi sumber utama pendapatan daerah yang ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah supaya dirasakan oleh masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk sebagai pendapatan yang di peroleh daerah yang di kutip berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam mengkaji keuangan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah = Pajak Daerah + Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah

Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan daerahnya

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang di perlukan (Kuznets, 2016).

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu bagian utama dalam pembangunan ekonomi yang merupakan rangkaian proses multidimensional. Pembangunan ekonomi meliputi perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDBt} - \text{PDBt-1}}{\text{PDBt-1}} \times 100\%$$

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Secara umum jenis PAD antara lain retribusi daerah, pajak badan usaha milik daerah, pajak daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang terpisah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Peningkatan pendapatan asli daerah akan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap belanja modal. Semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin meningkat.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan, sehingga untuk meningkatkan belanja modal untuk pelayanan

publik dan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah harus menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan landasan teori dan penemuan hasil empiris tersebut maka menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

Adanya pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal pemerintah daerah yaitu merupakan salah satu bantuan eksternal yang diterima suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan program pemerintah daerah dalam melaksanakan dan menjalankan pelayanan publik.

Dengan demikian dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal, yaitu semakin tinggi nilai dana perimbangan maka semakin tinggi nilai belanja modal. pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian Vivi Oktavia (2023) dan Irwan (2023) mengatakan bahwa Dana perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H2 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Dengan Dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah sehingga sumber-sumber PAD terutama yang berasal dari pajak daerah akan semakin

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Jumlah Dana Perimbangan dari masing-masing pemerintah kabupaten}$$

pelayanan publik yang memadai sehingga hal ini akan meningkatkan belanja modal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dikaji oleh Rendy Alvaro (2020) dan Kristianti, (2019)

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

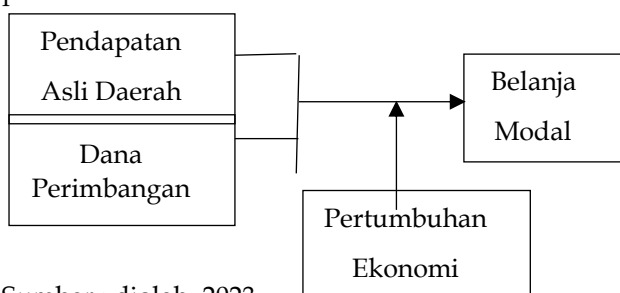
H3 : Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal dengan dimoderasi pertumbuhan ekonomi

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dengan Dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi

Dana perimbangan dari pemerintah pusat ini diharapkan mampu membiayai belanja pemerintah daerah dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan pemerintah daerahnya. Belanja modal yang meningkat dalam bentuk pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah dapat berpengaruh dalam merangsang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka akan berkaitan dengan dana perimbangan yang diterima oleh daerah tersebut.

Dalam penelitian yang dikaji oleh Irwan (2022) dan Rendy Alvaro (2020) mengatakan bahwa hasil uji moderasi pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating dapat memoderasi dalam pengaruh data perimbangan terhadap belanja modal.

H4 : Dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap belanja modal dengan dimoderasi pertumbuhan ekonomi



Sumber : diolah, 2023

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

3. METODE PENELITIAN

Berdasarkan dengan tujuan penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif yang dimana penelitian ini merupakan penelitian

yang menekankan pada pengujian teori atau hipotesis melalui pengukuran variabel yaitu mengetahui tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yaitu penelitian ilmiah yang bersifat sistematis terhadap fenomenanya. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Menurut Sugiyono (2017:137) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data pada penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran kabupaten pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur periode 2019-2022. Laporan realisasi anggaran diperoleh dari situs resmi yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam penelitian ini teknik analisis data yaitu berupa teknik analisis data kuantitatif yang dinyatakan berupa angka dan perhitungannya dengan alat bantu statistik dengan program SPSS (*Statistic Program For Social Science*). Analisis data yang digunakan adalah pengujian uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan uji hipotesis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pengelolaan data SPSS pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,059 dengan Asymp. Sig (2-tailed) 0,200 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai koefisien signifikansi yaitu 0,05.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	111
Test Statistic	0.059
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.200

Sumber : IBM SPSS Statistics 26

Hal ini menunjukkan bahwa data residual pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi dalam

penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolenieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolenieritas

Sumber : IBM SPSS Statistics 26

Berdasarkan hasil uji multikolenieritas pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* pendapatan asli daerah sebesar 0,750, dana perimbangan 0,739, dan pertumbuhan ekonomi 0,983, ketiga variabel independen dalam

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PAD	.750	1.334
	DP	.739	1.354
	PE	.983	1.018

penelitian ini memiliki nilai *tolerance* diatas 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai VIF menunjukkan ketiga variabel independen yang menunjukkan angka dibawah 10 yang pertama adalah pendapatan asli daerah nilai VIF 1,334 dan dana perimbangan memiliki nilai VIF 1,354, dan pertumbuhan ekonomi memiliki nilai VIF 1,018. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari multikolenieritas antar variabel.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model		t	Sig.
1	(Constant)	1.291	.200
	PAD	1.654	.101
	DP	1.770	.080
	PE	2.815	.060

Sumber : IBM SPSS Statistics 26

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan uji *glejser*. Berdasarkan Tabel 4 pada pengujian uji glijster diatas menunjukkan bahwa untuk masing-masing variabel independen memiliki nilai signifikan yaitu pendapatan asli daerah 0,101, dana perimbangan 0,080 dan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,060. Dimana tidak ada variabel

independen yang memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa di dalam model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 5. Hasil Uji MRA

Model	B	Sig.
(Constant)	-3191137700.318	.961
PAD	.164	.001
DP	.152	.002
PAD*PE	.003	.771
DP*PE	.038	.000

Sumber : IBM SPSS Statistics 26

Berdasarkan hasil uji *Moderated Regression Analysis* pada Tabel 6 dapat dirumuskan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1PAD + \beta_2DP + \beta_4PAD*PE + \beta_5DP*PE + e$$

$$BM = -3191137700.318 + 0,164 PAD + 0,152 DP + 0,003 PAD*PE + 0,38 DP*PE + e$$

Uji Hipotesis

Uji F

Tabel 6. Hasil Uji F

Model	F	Sig.
Regression	81.622	.000 ^b

Sumber : IBM SPSS Statistics 26

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis alternatif diterima. Hal ini berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi belanja modal atau dapat dikaitkan variabel pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi berpengaruh terhadap belanja modal.

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model	Adjusted R Square
1	.643

Sumber : IBM SPSS Statistics 26

Dari Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai R Square

dan Adjusted R Square masing-masing sebesar 0,659 dan 0,643 maka dapat disimpulkan hasil sebesar 64,3% perubahan belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan sisanya 35,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji t
Tabel 8. Hasil Uji t

Model	t	Sig.
1 (Constant)	-.048	.961
PAD	3.355	.001
DP	3.168	.002
PAD*PE	.291	.771
DP*PE	3.596	.000

Sumber : IBM SPSS Statistics 26

H1 diperoleh hasil t-hitung sebesar 3,355 dengan signifikansi sebesar 0,001. Nilai signifikan variabel PAD menunjukkan nilai dibawah dibawa tingkat Sig. artinya pengaruh yang positif dengan nilai konstanta 0,164 bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, sehingga H1 diterima.

H2 diperoleh hasil t-hitung sebesar 3,168 dengan signifikansi sebesar 0,002. Yang berarti H2 diterima sehingga terdapat pengaruh yang positif dengan nilai konstanta 0,152 bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal, sehingga H2 diterima.

H3 (PAD*PE) diperoleh hasil t-hitung sebesar 0,291 dengan signifikansi sebesar 0,771 atau ($0,771 > 0,05$). Yang artinya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan tidak dapat memoderasi hubungan PAD pada belanja modal, sehingga H3 ditolak.

H4 (DP*PE) diperoleh hasil t-hitung sebesar 3,596 dengan nilai signifikansi 0,000 atau ($0,000 < 0,05$). Artinya pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat moderasi hubungan dana perimbangan terhadap belanja modal yang dimana nilai konstanta 0,38.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis dan pembahasan, maka diperoleh hasil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: Hasil dari pengujian hipotesis pertama adalah pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil dari pengujian hipotesis kedua adalah dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil dari pengujian hipotesis ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi hubungan antara PAD terhadap belanja modal. Hasil dari pengujian hipotesis keempat yaitu pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi hubungan antara dana perimbangan terhadap belanja modal.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan peneliti, berikut beberapa saran untuk peneliti selanjutnya, yaitu (1) Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian ulang dengan menggunakan provinsi jawa yang lainnya (2) Peneliti selanjutnya di harapkan untuk menambahkan variabel-variabel yang kemungkinan mampu untuk mempengaruhi belanja modal.

6. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (n.d.). *Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Menurut Jenis Belanja di Provinsi Jawa Timur, 2017-2020*. Retrieved from <https://jatim.bps.go.id/>.

Irwan, M. N. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderating. *Journal of Accounting Finance*.

Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. Ub Press.

Kristianti, I. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal SErta Dampaknya Pada Pertumbuhan

Ekonomi.

Kuznets, S. (2016). *Economic Growth and Income Inequality*. The American.

Nashshar, M. I. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai variabel moderasi. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (Nomor 58 Tahun 2005). *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (Nomor 71 Tahun 2010). *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (n.d.). Nomor 25 Tahun 2004.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (n.d.). Nomor 33 Tahun 2004.

Rendy Alvaro, A. P. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi pada provinsi di Indonesia. *Jurnal Budget*.

Steward, J. H. (1972). *Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution*. University of Illinois Press.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung.

Vivi Oktavia, D. Z. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2019-2021. *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.

Waskito, Z. R. (2019). *Tinjauan Literatur dan Perumusan Hipotesis . Pengaruh Pertumbuhan*

Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh, 226.